

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilakukan suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional yang ingin dicapai. Di Indonesia sendiri dalam perkembangan ketatanegaraan melalui amandemen UUD Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada pembukaan alinea keempat mempertegas tujuan nasional Bangsa Indonesia mengenai pengaturan kesejahteraan masyarakat yang telah diatur pada Bab XIV UUD NKRI Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Pengertian pembangunan menurut Todaro dan Smith adalah sebuah kondisi dimana terjadi peningkatan output ekonomi secara agregat. Hal tersebut dapat didorong melalui peningkatan kegiatan produktivitas pelaku ekonomi yang dapat diukur melalui pendapatan per kapita, yang sederhananya memberikan gambaran mengenai seberapa besar nilai ekonomi yang telah diberikan pada periode tertentu. Peningkatan besaran per kapita diasumsikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.² Oleh karena itu setiap negara berusaha untuk dapat meningkatkan dan mempercepat pembangunan guna mencapai suatu keadaan yang lebih baik.

² Eko Sudarmanto, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 2

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman karakteristik pada tiap daerahnya baik itu dari kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya dan adat istiadat serta taraf hidup sehingga dalam mewujudkan pembangunan nasional hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang besar.³ Kondisi tersebut juga mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah juga berbeda-beda karena adanya ketimpangan pembangunan dan ketimpangan keuangan antar daerah. Hingga saat ini peningkatan pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah masih menjadi fokus dan misi prioritas Pemerintah Indonesia agar tujuan dari pembangunan nasional dapat tercapai.

Dalam rangka pemerataan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah guna mencapai tujuan nasional, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, dimana keadaan tersebut dikenal sebagai prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang didapatkan oleh daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat di daerah tersebut menurut sebuah gagasan yang berasal dari aspirasi masyarakat dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Otonomi daerah ini dimaksudkan agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta menekan angka kesenjangan antar daerah dengan meningkatkan kualitas layanan kepada

³ Achmad Sani Alhusain, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal 7-8

⁴ Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, (Surabaya: Erlangga, 2006), hal. 338

masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Prinsip otonomi daerah lahir dengan tujuan agar pemerintah daerah melalui hak dan tanggung jawabnya yang telah ditingkatkan dapat mengelola rumah tangganya sendiri. Penerapan otonomi daerah di Indonesia sudah berjalan kurang lebih selama dua dasawarsa sejak diberlakukan pada tahun 2001 merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.⁵ Penerapan otonomi daerah salah satunya ditandai dengan adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Dengan adanya desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja dengan efektif dan efisien melalui pemakaian dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah kabupaten/kota secara menyeluruh.

Adanya pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah untuk dapat mengelola penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam atau

⁵ Ningsih dan Novianty, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018*, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3 (2), hal. 91

sumber daya lain secara mandiri yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diiringi dengan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) atau ketiganya dapat disebut dengan dana perimbangan untuk dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya dapat berkontribusi dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut sesuai dengan teori federalisme fiskal yang menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang lebih besar untuk dapat mengatur segala urusan daerah yang salah satunya desentralisasi fiskal.⁶

Dengan adanya desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerah dalam mendanai atau membiayai pengeluaran/belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memanfaatkan sebaik mungkin transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) guna menstimulasi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningsih dan Noviaty (2019), dimana menunjukkan hasil bahwa secara individu baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap

⁶ Kresnandra, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi*, Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, hal. 44

pertumbuhan ekonomi dan secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

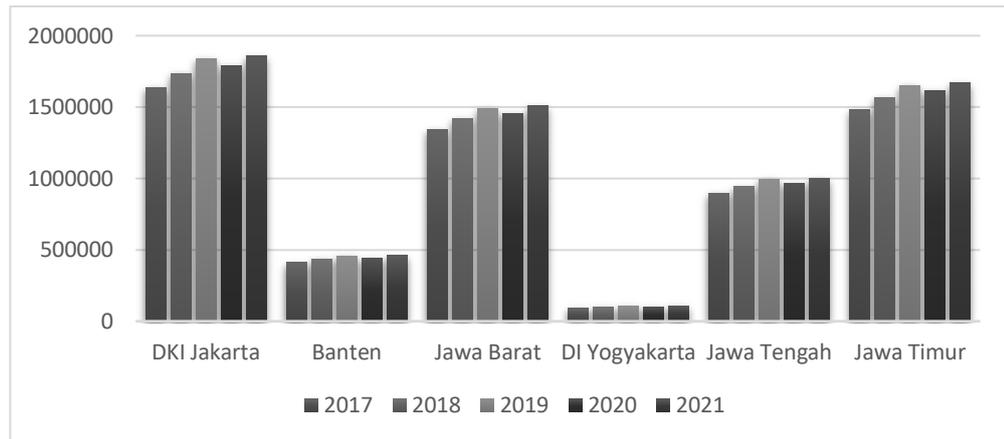
Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator penting untuk dapat menganalisis pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses naiknya output per kapita secara berkala dari waktu ke waktu. Definisi tersebut menegaskan pada tiga aspek penting yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dan tidak hanya menggambarkan keadaan ekonomi pada suatu saat. Berarti proses dan keadaan ekonomi akan mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan kenaikan output per kapita dimana yang diperhatikan adalah sisi output total dan jumlah penduduk. Ketiga, yaitu potensial untuk jangka kedepan, yang berarti suatu perekonomian akan tumbuh dalam jangka waktu yang relatif lama, misalnya dalam jangka waktu sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun bahkan lebih lama lagi. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan terealisasi apabila terdapat kecenderungan atau kekuatan internal yang bersumber dari perekonomian itu sendiri.⁷ Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dibaca atau dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di Indonesia daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional adalah daerah yang berada di Pulau Jawa. Hal tersebut

⁷ Anita Sri Wahyuni, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta*, Jurnal STEI Eekonomi, Vol XX, No XX, (Juli, 2020)

dikarenakan pembangunan yang dilakukan kebanyakan berada di Pulau Jawa dan Pulau Jawa juga merupakan sumber industri dan pusat keuangan.

Gambar 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2021 di 6
Provinsi Pulau Jawa

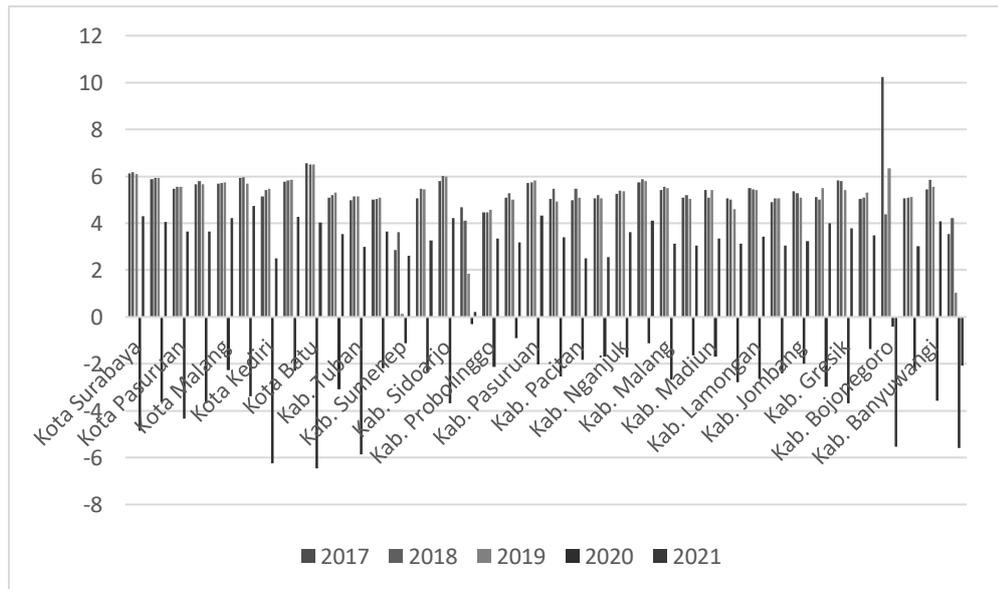


Sumber: BPS Jawa Timur

Dari grafik diatas diketahui bahwa dari enam daerah di Pulau Jawa yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah DKI Jakarta, karena merupakan ibu kota negara dan menjadi pusat pembangunan dan keuangan. Provinsi Jawa Timur menempati urutan nomer dua lebih tinggi dari pada provinsi lainnya. Hal tersebut memberikan arti bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki pengaruh dan banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Selain dikarenakan menjadi pusat industri, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur salah satunya juga disebabkan oleh sumber pendanaan yang memadai untuk melakukan belanja daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, 38 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda pada tahun 2017-2021.

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Jawa Timur (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling besar diantaranya adalah Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan Kota Blitar, Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Nganjuk, Kota Surabaya, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bondowoso dan dikuti oleh daerah lainnya. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki kontribusi paling kecil adalah Kabupaten Bangkalan. Dari data tersebut membuktikan bahwa setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi yang berbeda-beda yang berarti masih banyak aspek-aspek penerimaan yang masih menjadi kewenangan bagi pemerintah pusat. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa

pendapatan daerah yang hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berjalan secara maksimal dan masih memerlukan transfer dana berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, akan tetapi hal tersebut tidak mencerminkan tingkat kemandirian daerah tersebut juga meningkat. Hal tersebut tercermin pada proposi dana perimbangan pada tahun 2017-2021 yang juga mengalami peningkatan yang berarti sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih bergantung pada dana transfer dari pusat atau yang dikenal sebagai dana perimbangan untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1
Realisasi Dana Perimbangan Jawa Timur
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Dana Perimbangan (Rp)
1	2017	12.494.048.645.633,00
2	2018	13.295.784.849.272,20
3	2019	13.941.687.209.994,60
4	2020	13.480.111.730.763,30
5	2021	15.186.749.240.653,00

Sumber: BPS Jawa Timur

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi dana perimbangan untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021 semakin meningkat. Semakin besarnya dana perimbangan yang diberikan menunjukkan ketidakmampuan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pendanaan dalam melakukan percepat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak terhadap

pembangunan nasional melalui pengelolaan potensi dan pemanfaatan sumber daya asli daerah tersebut, sehingga kemampuan fiskalnya masih bergantung kepada pemerintah pusat.

Di sisi lain untuk dapat lepas dari ketergantungan pembiayaan yang dilakukan pemerintah pusat melalui dana transfer, pemerintah daerah harus terus memaksimalkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pada penerapan desentralisasi fiskal pemerintah daerah mempunyai otoritas penuh untuk memaksimalkan porsi pendapatan daerah yang berasal dari PAD guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) merupakan hak pemerintah daerah yang secara legal dimaksudkan untuk penambahan nilai kekayaan bersih (*net worth*) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana terkandung dalam undang-undang yang berlaku.

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1	2017	17.324.177.664.424,20
2	2018	18.531.062.021.823,40
3	2019	19.327.125.485.405,90
4	2020	17.950.996.508.801,03
5	2021	18.935.883.965.350,90

Sumber: BPS Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa data realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021 yang diambil dari *website* BPS Jawa Timur mengalami keadaan yang berfluktuasi, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur terkecil terjadi pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2019.

Meskipun demikian peningkatan porsi PAD melalui pajak dan retribusi daerah juga harus diimbangi dengan penggalan dan pemanfaatan sektor-sektor basis yang dimiliki daerah. Pada teori basis ekonomi dijelaskan bahwa sektor-sektor basis daerah harus dikembangkan karena sektor basis merupakan faktor penggerak utama terhadap perekonomian regional.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui dan menguji pengaruh atau hubungan dari variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka adapun identifikasi masalah yang ditemukan diantaranya sebagai berikut:

⁸ Candra Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 31.

1. Adanya desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerah dalam mendanai atau membiayai pengeluaran/belanja pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Dana perimbangan berguna untuk membantu membiayai belanja daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat menambah angka perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional suatu negara.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui dan menguji apakah dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui dan menguji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan nilai guna atau manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan rujukan dalam bidang ekonomi serta terhadap studi yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam menulis karya ilmiah dan mampu meningkatkan wawasan yang berhubungan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambahkan informasi mengenai pentingnya dalam memaksimalkan kekayaan dan potensi yang dimiliki daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan data tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan pembahasan pada bidang kajian ini.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan mengenai pembangunan daerah sehingga masyarakat dapat ikut serta baik dalam pengawasan bahkan berpartisipasi untuk mempercepat pembangunan daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi guna menghindari meluasnya pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka ruang lingkup yang akan dibahas oleh peneliti antara lain:

1. Objek Penelitian
 - a. Penelitian dilakukan di 11 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dan memiliki data yang lengkap.
 - b. Penelitian ini menggunakan data pada tahun 2017-2021.

2. Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar lebih fokus penelitian yang dilakukan penulis dibatasi pada:

- a. Pembatasan penelitian ini hanya terhadap data DJPK dan BPS Jawa Timur yang berkaitan dengan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi di 11 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dan memiliki kelengkapan data antara lain Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan Kota Blitar, Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Nganjuk, Kota Surabaya, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bondowoso.
- b. Data yang digunakan untuk penelitian mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

- c. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder dari BPS Jawa Timur dan DJPK Kemenkeu yang kemudian di analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini untuk menghindari interpretasi yang beragam dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian antara lain:

1. Definisi Konseptual

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah.⁹
- b. Dana perimbangan adalah penerimaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁰
- c. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan keadaan aktivitas perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama rentang waktu tertentu.¹¹

⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 18

¹⁰ *Ibid*, hal. 20

¹¹ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 231

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian yang berjudul “Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021” ini merupakan penelitian secara kuantitatif yang fokus mengukur pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kondisi dimana bertambahnya seluruh aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut menuju keadaan yang lebih baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, faktor yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan. PAD sendiri merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan potensi daerah dan pendapatan potensial lain yang berasal dari daerah itu sendiri. Sedangkan dana perimbangan merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna memperlancar penyelenggaraan desentralisasi fiskal.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penulisan skripsi yang dituliskan penulis untuk mempermudah pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan kajian pustaka yaitu pembahasan dan teori pada tiap variabel yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, (populasi, sampling, dan sampel), (sumber data, variabel, dan skala pengukuran), teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisi deskripsi data serta pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan pengujian atas hipotesis.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan oleh penulis. Bagian akhir penulisan skripsi juga memuat daftar pustaka dan daftar lampiran.